Analysis of Justice Inequality in Indonesia: A Blurry Portrait of Law Favoring Power

Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa

Ramadhan Dwi Prasetyo¹ Nurrahim Hasan Al Banna² Naufal Nafis Ardana³
Muhammad Fakhri kurniawan⁴

¹Road Transport Safety Polytechnic, Indonesia. E-mail: ramadhan@pktj.ac.id

²Road Transport Safety Polytechnic, Indonesia. E-mail: rohimbanna@gmail.com

³Road Transport Safety Polytechnic, Indonesia. E-mail: ardananaufal23@gmail.com

⁴Road Transport Safety Polytechnic, Indonesia. E-mail: fabrikrwn515@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the factors causing inequality in access to justice between upper and lower groups in the Indonesian legal system and its impact on public trust and social structure. This study uses a normative legal research method with several approaches, namely: (1) A conceptual approach to analyze the concept of justice, inequality, and human rights in the context of national and international law; (2) A legislative approach to analyze legal provisions related to the right to justice and legal aid; (3) A sociological approach to analyze the impact of inequality in access to justice based on empirical data. The results of the study indicate that inequality in access to justice is caused by socio-economic factors, low legal literacy, and the dominance of power in the legal system. The impact is a decrease in public trust in the legal system, widening social disparities, and strengthening structural discrimination. Based on these findings, the study recommends strengthening legal aid institutions, increasing public legal literacy, and reforming the legal system by emphasizing transparency and accountability, as well as the use of information technology to create more equal and inclusive access to justice.*

Keywords: *Inequality of Justice; Access to Law; Domination of Power.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan akses keadilan antara kelompok atas dan bawah dalam sistem hukum Indonesia serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan struktur sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yakni: (1) Pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep keadilan, ketimpangan, dan hak asasi manusia dalam konteks hukum nasional dan internasional; (2) Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait hak atas keadilan dan bantuan hukum; (3) Pendekatan sosiologis untuk menganalisis dampak ketimpangan akses keadilan berdasarkan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses keadilan disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta dominasi kekuasaan dalam sistem hukum. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, semakin lebar kesenjangan sosial, dan penguatan diskriminasi struktural. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan penguatan lembaga bantuan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan reformasi sistem hukum dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, serta penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan akses keadilan yang lebih setara dan inklusif.

Kata Kunci: Ketimpangan Keadilan; Akses Hukum; Dominasi Kuasa.

1. Pendahuluan

Ketimpangan dalam akses terhadap keadilan telah menjadi isu krusial dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Prinsip dasar hukum yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi sering kali terhambat oleh faktor sosial-ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kemampuan finansial, akses terhadap bantuan hukum, serta jaringan sosial-politik individu. Dalam konteks ini, individu dari kalangan atas memiliki keuntungan lebih besar dalam menyewa pengacara berkualitas tinggi atau memanfaatkan pengaruh politik untuk memengaruhi hasil pengadilan. Sebaliknya, masyarakat dari kalangan bawah sering kali terhambat oleh biaya hukum yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka (Hadi, 2020).

Fenomena ini menciptakan paradoks dalam sistem hukum. Sementara tujuan utama hukum adalah menegakkan keadilan secara setara, kenyataannya sering kali menunjukkan ketidakadilan struktural. Sebagai contoh, penelitian oleh Komnas HAM Indonesia (2020) mengungkap bahwa masyarakat miskin cenderung menghadapi hambatan dalam proses hukum, baik dalam penyelesaian sengketa perdata maupun pembelaan terhadap perkara pidana. Ketidakadilan akses terhadap keadilan juga diidentifikasi oleh Hidayat (2019), yang menemukan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat miskin lebih sering menghadapi hambatan dalam mencari keadilan. Hambatan ini meliputi ketidakmampuan membayar jasa pengacara, keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum, serta minimnya pemahaman akan prosedur hukum. Ketidakadilan ini diperburuk oleh birokrasi hukum yang kaku dan cenderung menguntungkan mereka yang memiliki koneksi atau kekuatan ekonomi lebih besar (Suryadi, 2021).

Beberapa kasus konkret menunjukkan bagaimana ketimpangan ini berdampak nyata. Salah satunya adalah perbedaan vonis hukuman antara pencuri ayam dan pelaku korupsi besar. Sebuah kasus yang mencuri perhatian adalah vonis terhadap Fina Salsabila Aulia, seorang pencuri ayam, yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara, sementara Harvey Moeis, seorang koruptor dengan nilai ratusan triliun rupiah, hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara (Fina Salsabila Aulia, 2024). Ketimpangan ini memicu reaksi keras dari publik, yang mempertanyakan keadilan sistem hukum dan biasanya dalam menghukum pelaku dari berbagai kelas sosial. Kasus ini menyoroti bagaimana sistem hukum sering kali lebih berat terhadap pelaku dari kalangan bawah, sedangkan pelaku dari kalangan atas mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun dampaknya terhadap masyarakat jauh lebih besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap keadilan antara kalangan atas dan kalangan bawah di Indonesia? Kedua, bagaimana dampak ketimpangan akses keadilan terhadap kepercayaan publik dan struktur sosial di Indonesia?

Penelitian ini memperkaya kajian ketimpangan akses keadilan dengan pendekatan kontekstual terhadap kasus-kasus aktual di Indonesia yang mencerminkan bias kelas dalam sistem hukum. Berbeda dari penelitian terdahulu seperti Galanter (1974) dan Rhode (2004) yang fokus pada sistem peradilan di negara maju, penelitian ini menonjolkan karakteristik ketidakadilan di negara berkembang, khususnya Indonesia,

dengan memperkuat argumentasi melalui data terbaru dan analisis kasus nyata. Hal ini menunjukkan originalitas tulisan dalam mengkaitkan dinamika sosial-ekonomi lokal dengan praktik hukum aktual. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah: Pertama, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan akses keadilan antara kalangan atas dan kalangan bawah dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, mengidentifikasi dampak ketimpangan akses keadilan terhadap tingkat kepercayaan publik dan struktur sosial masyarakat.

Pengkajian kasus-kasus representatif dan melakukan analisis terhadap kebijakan hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Reformasi struktural, peningkatan kapasitas bantuan hukum, dan edukasi hak-hak hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mengatasi ketimpangan ini (UNDP, 2016).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma hukum, dan prinsip hukum melalui analisis bahan-bahan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan norma atau kaidah dalam sistem hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep keadilan, ketimpangan, dan hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Konsep-konsep ini penting untuk membingkai analisis terhadap ketidakadilan dalam akses hukum. 2). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi dasar dalam membahas jaminan akses terhadap keadilan. 3). Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*): Digunakan untuk menganalisis realitas sosial di masyarakat terkait praktik ketimpangan akses keadilan, dengan merujuk pada data empiris dari lembaga survei, laporan lembaga bantuan hukum, dan studi kasus.

Tabel 1. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini

No	Jenis	Bahan Hukum
1	Hukum Primer	<ul style="list-style-type: none"> o Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 o Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum o Putusan-putusan pengadilan terkait kasus korupsi dan kasus pidana ringan yang menjadi ilustrasi ketimpangan akses keadilan.

2	Hukum Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ○ Buku-buku teks hukum yang relevan seperti <i>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.</i> ○ Artikel jurnal ilmiah tentang ketimpangan keadilan, hak asasi manusia, diskriminasi hukum, seperti jurnal dari <i>Indonesia Corruption Watch, Komnas HAM Indonesia, PSHK, dan UNDP Indonesia.</i> ○ Laporan tahunan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan ICW.
3	Hukum Tersier	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen resmi lain yang mendukung klarifikasi konsep hukum seperti <i>Black's Law Dictionary</i> dan <i>Kamus Hukum Indonesia.</i>

Teknik Analisis Bahan Hukum menggunakan metode analisis kualitatif terhadap bahan hukum, melalui interpretasi sistematis dan konseptual untuk mengidentifikasi pola ketimpangan akses keadilan, dampak dan faktor penyebabnya.

3. Analisis Ketimpangan Akses Keadilan antara Kalangan Atas dan Bawah

Penelitian ini menganalisis ketimpangan akses keadilan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan dua fokus utama: faktor penyebab ketimpangan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta struktur sosial. Analisis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, historis, dan sosiologis.

3.1. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Akses Keadilan

Ketimpangan akses keadilan di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi sosial-ekonomi, minimnya literasi hukum, dan dominasi kekuasaan dalam sistem hukum.

3.1.1 Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu akar utama ketidaksetaraan dalam akses keadilan di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan perbedaan kemampuan dalam memperoleh perlindungan hukum antara kalangan atas dan bawah. Masyarakat dari kalangan bawah sering kali menghadapi kendala serius dalam membayar biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan memenuhi persyaratan hukum lainnya (Rahardjo, 2010). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), lebih dari 60% rumah tangga miskin di Indonesia tidak memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa hanya 28% masyarakat miskin yang mengetahui keberadaan program bantuan hukum gratis yang disediakan

pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (BPHN, 2023).

Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari total perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sebanyak 72% berasal dari masyarakat miskin dan rentan, dengan dominasi kasus pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan ringan, dan perselisihan lahan (BPHN, 2023). Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya kelompok ekonomi lemah terhadap kriminalisasi. Selain itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS, 2023) melaporkan bahwa biaya rata-rata untuk mengakses proses peradilan (biaya perkara, transportasi, konsultasi hukum) mencapai 2-4 juta rupiah per kasus, jumlah yang sangat memberatkan masyarakat dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional (1,9 juta rupiah/bulan menurut BPS, 2023).

Ketimpangan ini berimplikasi pada realitas sosial di mana masyarakat miskin lebih cenderung menghadapi konsekuensi hukum yang berat, meskipun pelanggaran yang mereka lakukan bersifat ringan. Sebaliknya, kalangan atas memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara ternama, mengakses jalur non-litigasi, atau bahkan memanfaatkan koneksi politik untuk memperingan atau menghindari hukuman. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dalam hal akses terhadap keadilan, memperkuat diskriminasi struktural dalam sistem hukum Indonesia.

3.1.2 Minimnya Literasi Hukum

Minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi hambatan serius dalam akses terhadap keadilan di Indonesia. Menurut Komnas HAM (2020), lebih dari 70% masyarakat miskin tidak memahami prosedur hukum, hak-hak mereka sebagai terdakwa atau penggugat, serta mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Penelitian oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK, 2021) juga memperkuat temuan ini, dengan mencatat bahwa hanya sekitar 30% masyarakat di daerah pedesaan yang mengetahui bahwa mereka berhak atas bantuan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang diakui negara. Data lebih mutakhir dari Laporan Indeks Akses terhadap Keadilan yang diterbitkan oleh The Asia Foundation dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI, 2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum di Indonesia masih rendah, dengan skor rata-rata nasional hanya 45 dari 100. Bahkan, di wilayah Indonesia bagian timur, angka literasi hukum turun menjadi di bawah 35%, memperlihatkan kesenjangan yang cukup tajam dibandingkan wilayah perkotaan di Pulau Jawa.

Minimnya pemahaman terhadap hukum ini berimplikasi langsung pada meningkatnya risiko ketidakadilan sistemik. Banyak individu dari kelompok

miskin atau marginal yang akhirnya tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, baik dalam proses peradilan pidana maupun dalam perkara perdata seperti sengketa tanah dan perburuhan. ICJR (Institute for Criminal Justice Reform, 2024) mencatat bahwa dalam kasus pidana, terdakwa dari kalangan miskin lebih sering menerima hukuman berat dibandingkan terdakwa yang mampu membayar penasihat hukum profesional. Lebih jauh, rendahnya literasi hukum ini juga menghambat efektivitas program-program pemerintah seperti bantuan hukum gratis (sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 melaporkan bahwa dari total anggaran bantuan hukum, hanya sekitar 60% yang terserap, sebagian besar karena rendahnya kesadaran masyarakat bahwa layanan tersebut tersedia dan dapat diakses tanpa biaya. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi hukum dan sosial di Indonesia, melalui edukasi berbasis komunitas, pemanfaatan media digital, dan penguatan peran lembaga bantuan hukum di tingkat lokal.

3.1.3 Dominasi Kekuasaan dan Pengaruh dalam Penegakan Hukum

Kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi hasil proses peradilan praktik penegakan hukum di Indonesia. Huda (2018) menyoroti bahwa koneksi politik sering kali memberikan keuntungan tidak adil bagi terdakwa dari kalangan elit. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2022) menunjukkan bahwa dalam 80% kasus korupsi besar, pelaku yang memiliki afiliasi politik atau koneksi kekuasaan menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa atau pihak swasta tanpa pengaruh politik. Rata-rata hukuman pidana untuk koruptor berprofil tinggi hanya sekitar 2 tahun 7 bulan, jauh di bawah ancaman maksimum pidana dalam undang-undang korupsi yang mencapai 20 tahun atau bahkan pidana seumur hidup. Lebih baru, Laporan Monitoring Peradilan Pidana oleh MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, 2024) mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kasus besar seperti korupsi pengadaan barang di kementerian dan penyalahgunaan APBD, terdapat kecenderungan pemberian vonis ringan atau bahkan pembebasan murni terhadap terdakwa yang diketahui memiliki hubungan kuat dengan elit politik nasional maupun daerah.

Selain itu, Transparency International Indonesia (TII, 2024) dalam *Global Corruption Barometer* juga menemukan bahwa 57% responden di Indonesia percaya bahwa "uang dan koneksi" lebih menentukan hasil di pengadilan dibandingkan bukti dan keadilan. Temuan ini memperlihatkan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap independensi lembaga peradilan. Dominasi kekuasaan dalam penegakan hukum tidak hanya menyebabkan ketidakadilan individu, tetapi juga memperkokoh diskriminasi struktural di dalam sistem hukum. Warga negara dari kalangan bawah, tanpa koneksi atau

sumber daya, menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan keadilan, sementara elite politik dan ekonomi dapat mengakses perlakuan istimewa. Kondisi ini memperlebar ketimpangan akses terhadap keadilan dan memperlemah legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

Oleh karena itu, reformasi struktural yang memperkuat independensi peradilan, mengawasi integritas aparat hukum, serta memperketat mekanisme pengawasan publik menjadi sangat mendesak untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

3.2 Dampak Ketimpangan Akses Keadilan terhadap Kepercayaan Publik dan Struktur Sosial

Ketimpangan akses keadilan bukan hanya persoalan individual, melainkan telah mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem hukum dan memperlebar kesenjangan sosial. Ketimpangan akses keadilan menghasilkan dampak signifikan bagi masyarakat dan negara, seperti:

3.2.1 Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

Ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum telah memperburuk persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Rahardjo (2010) mengemukakan bahwa rasa keadilan masyarakat menjadi goyah ketika hukum tidak berfungsi sebagai instrumen keadilan melainkan sebagai alat kekuasaan. Ketika hukum hanya melayani kepentingan golongan tertentu, maka legitimasi sosial terhadap sistem hukum secara keseluruhan mengalami erosi.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengalami penurunan signifikan. Survei tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 58,6% responden yang menyatakan "percaya" terhadap lembaga peradilan, turun dari 65% pada survei serupa tahun 2020. Lebih lanjut, Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2023) menemukan bahwa hanya 41% masyarakat Indonesia yang percaya bahwa sistem hukum saat ini mampu bertindak adil tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Ketidakpercayaan ini lebih kuat di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan di daerah terpencil.

World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 68 dari 142 negara dalam aspek keadilan sipil, dan dalam sub-indikator "absence of corruption in the judiciary," skor Indonesia hanya 0,47 dari skala 1,0, menunjukkan persepsi korupsi di sektor peradilan masih relatif tinggi. Penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum berdampak luas. Salah satunya adalah kecenderungan masyarakat untuk mencari penyelesaian sengketa melalui jalur informal seperti "pengadilan adat," "perdamaiian kampung," atau bahkan praktik-praktik main hakim sendiri, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekerasan sosial.

Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan langkah nyata seperti reformasi menyeluruh terhadap lembaga hukum,

transparansi dalam proses peradilan, penguatan akuntabilitas aparat hukum, serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat.

3.2.2 Kesenjangan Sosial yang Semakin Melebar

Minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya berdampak pada akses keadilan, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada. Komnas HAM (2020) menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan kelompok miskin kota sering kali mengalami ketidakadilan berlapis akibat ketidakmampuan mereka memahami dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia.

Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK, 2021) juga menemukan bahwa hanya sekitar 30% dari kelompok masyarakat di pedesaan mengetahui hak dasar mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Kondisi ini menyebabkan kelompok rentan semakin termarginalkan, baik dalam hal hak atas tanah, ketenagakerjaan, maupun perlindungan dari kekerasan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mengungkapkan bahwa Indeks Ketimpangan Sosial Indonesia masih berada pada angka 0,387, yang berarti ketimpangan belum mengalami perbaikan signifikan. Salah satu penyebab yang diidentifikasi adalah rendahnya akses terhadap informasi dan perlindungan hukum di kalangan masyarakat marginal.

Sementara itu, The Asia Foundation (2023) dalam laporannya tentang akses keadilan di Indonesia, menemukan bahwa ketidaksetaraan akses hukum memperburuk stratifikasi sosial: masyarakat dengan akses ekonomi dan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mampu mempertahankan hak-hak hukumnya, sementara masyarakat miskin lebih sering mengalami pelanggaran hak tanpa adanya perlawanan hukum yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum yang semestinya menjadi alat pemerataan sosial justru, dalam praktiknya, turut melanggengkan ketidakadilan. Tanpa intervensi yang serius seperti edukasi hukum berbasis komunitas, penguatan lembaga bantuan hukum, serta pemberdayaan kelompok rentan melalui program afirmatif, kesenjangan sosial di Indonesia akan semakin melebar dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

3.2.3 Diskriminasi Struktural dalam Penegakan Hukum

Sistem hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan diskriminasi struktural yang serius. Ketika kekuasaan politik dan ekonomi secara tidak proporsional mempengaruhi jalannya proses hukum, maka hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan alat reproduksi ketimpangan sosial. Indonesia Corruption Watch (ICW, 2022) mencatat bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam pemberian hukuman antara terdakwa dari kalangan elite dengan masyarakat biasa. Data ICW menunjukkan bahwa rata-rata vonis untuk kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi hanya berkisar 2,7 tahun, sedangkan kasus serupa yang melibatkan warga biasa dapat mencapai 5 tahun atau lebih.

Komnas HAM (2023) dalam laporan *Penegakan Hukum dan HAM* juga menegaskan bahwa diskriminasi berbasis status sosial dan ekonomi masih menjadi pola dalam proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan. Masyarakat miskin, kelompok minoritas, dan masyarakat adat sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih keras dan minim perlindungan dibandingkan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Lebih jauh, World Justice Project (WJP, 2023) menunjukkan bahwa skor Indonesia dalam indikator "Equality Before the Law" hanya mencapai 0,54 dari skala 1,0, mengindikasikan masih kuatnya pengaruh diskriminasi dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2024) menemukan bahwa 63% responden percaya bahwa hasil suatu perkara lebih ditentukan oleh status sosial-ekonomi terdakwa dibandingkan kekuatan bukti di pengadilan.

Fenomena ini memperkuat ketidakadilan struktural, di mana hukum yang seharusnya menjadi alat koreksi ketimpangan justru memperdalam jurang perbedaan sosial. Diskriminasi ini menghambat prinsip dasar negara hukum, yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), dan memperlemah legitimasi sosial terhadap sistem peradilan nasional. Upaya untuk mengatasi diskriminasi struktural dalam penegakan hukum memerlukan reformasi mendasar, termasuk penguatan lembaga pengawas independen, penerapan sistem monitoring berbasis data terbuka, serta pendidikan berkelanjutan bagi aparat hukum untuk menumbuhkan perspektif keadilan sosial.

4. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses keadilan di Indonesia disebabkan oleh faktor ketimpangan sosial-ekonomi, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, serta dominasi kekuasaan politik dan ekonomi dalam proses penegakan hukum. Ketimpangan tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, melebar kesenjangan sosial, serta terjadinya diskriminasi struktural yang memperlemah perlindungan hak-hak kelompok rentan. Menjawab rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa akses keadilan di Indonesia masih belum merata dan cenderung berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah strategis berupa penguatan layanan bantuan hukum melalui peningkatan dukungan anggaran dan distribusi layanan ke wilayah terpencil, penyelenggaraan program pendidikan hukum berbasis komunitas guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta reformasi sistem hukum yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki ketidaksetaraan dalam sistem hukum dan mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia.

References

BPS. (2022). *Statistik Mengenai Kemampuan Finansial Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Hukum*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Galanter, M. (1974). "Why the "haves" Come Out Ahead: Speculations on The Limits of Legal Change". *Law & Society Review*. DOI: <https://doi.org/10.2307/3053023>
- Hadi, M. (2020). "Ketimpangan Sosial Dalam Akses Hukum: Studi Kasus di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(2), 45-60.
- Hidayat, R. (2019). "Kesenjangan Hukum di Kalangan Ekonomi Lemah". *Jurnal Sosial dan Keadilan*, 5(1), 22-38.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). "*Data Konkret Mengenai Hukuman Dalam Kasus Korupsi*". Jakarta: ICW.
- Komnas HAM Indonesia. (2020). "*Laporan tahunan: Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*". Jakarta: Komnas HAM.
- Lembaga Survei Indonesia. (2022). "*Data Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Hukum*". Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2021). "*Studi Tentang Tingkat Literasi Hukum Di Daerah Pedesaan*". Jakarta: PSHK.
- Rhode, D. L. (2004). "Access to justice". *Fordham Law Review*. <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4036&context=flr>
- Santoso, T. (2019). "*Bias dalam Sistem Peradilan Indonesia*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, T., et al. (2021). "Legal aid and Rural Communities: A Study of Access to Justice in Indonesia". *Indonesian Journal of Law and Policy*.
- Sugiyono. (2018). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2021). "Birokrasi Hukum dan Ketimpangan Akses Keadilan". *Jurnal Studi Hukum dan Kebijakan*, 10(4), 67-89.
- UNDP Indonesia. (2021). "*Statistik Tentang Kesenjangan Akses Keadilan Antara Kelompok Miskin Dan Kaya*". Jakarta: UNDP.
- Galanter, M. (1974). "Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change". *Law & Society Review*, 9(1), 95-160.
- Huda, N. (2018). "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2010). "*Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*". Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rhode, D. L. (2004). "*Access to justice*". Oxford University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2010). "*Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*". Yogyakarta: Genta Publishing.
- Aulia, F. S. (2024, Januari 16). "*Pencuri ayam 5 tahun, koruptor ratusan triliun Harvey Moeis 6,5 tahun, netizen: "Wes do nggedabrus!"*" AyoJakarta. <https://www.ayojakarta.com/news/7614212914/pencuri-ayam-5-tahun-koruptor-ratusan-triliun-harvey-moeis-65-tahun-netizen-wes-do-nggedabrus> (Accessed 5th January 2025)